Pematangan Tanah Air Indonesia sebagai Negara Arsipelago



Profesor Abimanyu Takdir Alamsyah

1. Wilayah Tanah Air Negara Arsipelago Indonesia

Gagasan Indonesia sebagai cita-cita bentuk tanah air bangsa baru di Asia Tenggara sebagai masa depan generasi muda Nusantara melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Gagasan "tanah air" Indonesia tersebut telah tercetuskan melalui nyanyian bersama lagu "Indonesia Raya", ciptaan Wage Rudolf Soepratman. Wujud negara arsipelago yang terdiri dari tanah kepulauan serta air kelautan memang memenuhi impian para pemuda calon negara Indonesia waktu itu yang berasal dari berbagai kepulauan dan kelautan seluruh Indonesia. Realita tersebut yang perlu menjadi acuan bahwa pembangunan di setiap bagian dari Indonesia hendaknya bagi kepentingan semua warga negara yang hidup di daratan kepulauan maupun di kawasan kelautannya.

Tekad tersebut tetap dipertahankan secara sepihak oleh Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 mengenai wilayah territorial kepulauan dan kelautan negara kesatuan Republik Indonesia sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Tuntutan garis batas terluar Wilayah Territorial Indonesia tersebut dalam United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 semakin disempurnakan dan ditambah dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang mencapai 200 mil laut sepanjang perbatasan luar Indonesia. Status negara arsipelago, batas wilayah Teritorial serta hak pengelolaan ZEE tersebut bagi Indonesia serta empat negara arsipelago lain merupakan awal disetujuinya negara-negara arsipelago lain nya di dunia ini. Sejak masa itu batas wilayah Indonesia tidak lagi hanya berupa garis batas daratan kepulauan saja namun secara internasional sudah diakui meliputi seluruh "tanah air" pulau-laut, wilayah kepulauan berikut kelautannya. Artinya, sejak tahun 1982 penyajian peta Indonesia yang hanya menyantumkan wilayah daratan kepulauan Indonesia saja merupakan kesalahan fatal, karena melemahkan eksistensi Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan pulau-laut (arsipelago) yang berbeda dengan negara daratan continental yang ada di dunia ini.

Sebagai negara arsipelago terbesar di dunia,s selain aspek batas wilayah tanah air serta semua ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengeloolaan wilayah yang dimiliki ecara sah secara internasional seharusnya segera dikaji kembali sesuai aspek-aspek lain yang terkait dengan segenap unsur bangsa Indonesia, termasuk kekhasan negara kesatuan yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika. Juga ketentuan serta kelengkapan maupun keberadaan berbagai keragaman unsur alami maupun buatan

serta aspek social budaya dariyang tinggal di tempat kehidupan di kawasan kepulauan maupun kelautan yang tidak semua dimiliki oleh negara arsipelago lain. Perbedaan tersebut antara lain bukan saja kondisi local lingkungan alam dan budaya masing-masing tempat di daratan maupun di perairannya, namun justru karena realita terjadinya perubahan lingkungan fisik alami maupun buatan serta social budaya masyarakat atau sifat pemerintahan sebelum dan sesudah kemerdekaan, maupun perkembangan sejarah kehidupan di daratan maupun lautan, ditambah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti sangat berbeda daripada masa sebelum status negara arsipelago disetujui. Dalam hal tersebut termasuk dampak perubahan lingkungan serta kenaikan muka laut terhadap perubahan lingkungan fisik di atas maupun di bawah muka laut, beserta semua kesepakatan internasional yang menyertainya. Dampak lain adalah semakin majunya, Pendidikan dan teknologi, semakin sempurnanya kemampuan penanggulangan dampak yang telah ditemukan, serta kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah besaran dampak bila kondisi lama masih dipertahankan. Apalagi semakin lama semakin nyata bahwa temuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta praktek pengelolaan unsur maupun keseluruhan wilayah dalam neger maupun dalam hubungannya dengan negara lain kadang tidak dapat dihindari, diikuti bahkan perlu persiapan untuk menanggulangi ketidak-cocokan dengan faham hingga aspek keamanan maupun pertahanan suatu negara arsipelago.

Perubahan tersebut seharusnya merupakan ketentuan formal yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan merupakan bagian dari tanggung jawab penuh bagi seluruh anggota pemerintahan di wilayah Nasional hingga daerah terpencil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kekalahan kita dalam mempertahankan pulau Simpadan dan pulau Ligitan di Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) merupakan kelemahan bangsa Indonesia, terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur pertahanan dan keamanan, hingga masyarakat sekitar kepulauan. Pemahaman tersebut perlu masuk dalam program Pendidikan Bangsa sejak usia dini. Salah satu hal yang penting adalah ditemukannya faham asing yang dibawa, atau dicoba diterapkan di negara arsipelago Indonesia tanpa mengaji kesesuaian atau justru masalah yang dapat timbul bila di terapkan di Indonesia. Juga keterkaitan atau justru perbedaan antar sector ilmu pengetahuan, pengembangan, penerapan hingga penyesuaian antar wilayah yang tidak selalu sama atau telah berubah satu sama lain yang memerlukan penyiapan dan kearifan dalam menerapkan ataupun mengganti dengan solusi lain dalam penyelesaian setempat atau antar tempat.

2. Keberlanjutan Wilayah Negara Arsipelago

Wilayah suatu negara arsipelago sangat terkait dengan keberlanjutan dari unsur kelautan, kepulauan, ekosistem, secara lingkungan alami maupun buatan, beserta makhluk hidup, terutama manusia atau penduduk setempat maupun antar tempat yang termasuk wilayah tanah air Indonesia, atau pulau-laut Nusantara ini. Keterkaitan manusia dengan lokasi kehidupan dan penghidupan di negara kesatuan kepulauan dan kelautan, atau tanah air tersebut berlaku dalam jangka pendek hingga masa yang jauh lebih panjang, di mana kehidupan dan penghidupan seseorang, dengan sesamanya hingga antar generasi yang saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan tanggung jawab sebagai warga negara bangsa Indonesia. Tanggung jawab tersebut menjadi bagian dari kehidupan warga negara, semua jenis dan status rakyat, suku bangsa, pemimpin kelembagaan negara maupun semua unsur pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah di pusat maupun daerah negara

kesatuan pulau-laut atau arsipelago ini. Pemahaman ini berlaku bagi semua yang terkait dengan Indonesia, apapun status formal, informal maupun non formal ketika berada di wilayah atau kawasan yang dikelolanya.

Hal tersebut juga terkait dengan tingkat social, pendidikan, budaya, apapun agama atau kepercayaannya, serta berfungsi dimanapun dia tinggal, berkegiatan baik secara menetap maupun berpindah, baik di puncak gunung, dataran tinggi, menengah dan rendah, hingga kawasan pesisir daratan, kawasan pesisir lautan, ataupun perairan kepulauan, baik yang dangkal, yang di sekitar pulau atau kepulauan hingga jauh dari pulau utama atau kepulauan di sekitarnya, bahkan terpencil di lautan dalam sekalipun. Pengertian tinggal, bertugas atau berkegiatan dapat dari yang bersifat menetap, bergerak, berpindah atau ulang-alik, baik di daratan, di lautan, maupun ulang-alik antar kepulauan dan kelautan di dalam wilayah dalam negeri maupun antara dalam dan luar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Identifikasi persyaratan mengenai keberlanjutan Indonesia dalam berbagai pernyataan dalam uraian di atas bukan merupakan persyaratan formal berdasarkan peraturan, ketentuan atau kesepakatan internasional ataupun berpedoman kepada peristiwa global, namun justru berdasarkan sejarah itikad para pelopor pembentukan negara ini yang dicetuskan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928, oleh pemuda pemudi yang terdiri dari berbagai wakli dari berbagai unsur, kerajaan maupun suku bangsa yang berasal dari daratan kepulauan besar maupun kecil wilayah Asia Tenggara yang menyebut dirinya Nusantara ini, yang telah terjajah oleh negeri Belanda selama sekian ratus tahun.

Berbicara aspek keberlanjutan tentu tidak lepas daripada kondisi sebelum dengan sesudah terjadinya kegiatan baru ataupun perubahan yang diwujudkan setelah kondisi sebelumnya terjadi. Perubahan utama adalah kondisi umum sebagai negara terjajah dengan kondisi baru, seperti deklarasi Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, acuan-acuan pokok NKRI, klaim wilayah territorial NKRI hingga hak pengelolaan lautan seluas ZEEI, sarana prasarana serta semua aspek pendukungnya, dari posisi berbeda atau belum ada menjadi ada, penerapan, penyesuaian, serta pembaruan terhadap yang lebih sempurna. Dari jenis wilayah di daratan kkepulauan maupun lautan yang dikelola masing-masing suku bangsa, kerajaan, ataupun wujud organisasi kemasyarakatan tradisional dan budaya yang beragam, hingga kesepakatan menjadi kesatuan dan kebersatuan yang kadang justru berbeda dengan faham demokrasi yang mengutamakan hak yang berbasis perbedaan kepentingan, adat atau agama yang dalam kenyataan sebelumnya ternyata memang saling berbeda, bahkan bila ditinjau hanya demi kepentingan masing-masing dapat saling bertentangan, bahkan awalnya dapat menghasilkan konflik serta peristiwa lain sebagainya. Tentu keberlanjutan perlu berbasis pemahaman yang lebih mendalam, toleransi terhadap perbedaan, pengikhlasan bahkan pengorbanan dan perubahan agar dapat sampai kepada saling berbagi peluang penyesuaian, hingga kesepakatan untuk menuju kebersamaan, kebersatuan unsur yang semula sangat beragam namun disepakati untuk mengutamakan kesatuan bangsa dan tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Keragaman dan perbedaan yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa ini untuk diperlajari bersama dan menemukan apa dan bagaimana agar dapat diperoleh hasil yang lebih meningkat menjadi solusi masa depan yang lebih baik. Tentu saja proses dari kesepakatan Bersama dan keputusan untuk melahirkannya dalam satu kesatuan negara kepulauan dan kelautan membutuhkan proses dan perbaikan yang cukup arif serta masa yang belum tentu tercapai dalam jangka pendek serta tidak mudah dilakukan secara masal.

Dalam hal ini mereka yang dipercaya sebagai pemimpin hingga dipilih sebagai wakil-wakil kelompok hingga menduduki fungsi sebagai pengemban tugas pemerintahan dalam masa tertentu seharusnya telah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi dan tugas serta tanggung jawab membuat cita-cita dibentuknya negara arsipelago ini terwujud dan tercapai sesuai perkembangan jaman. Sangat disayangkan bahwa hasil beberapa pertemuan antara para pakar dan pejabat di salah satu perguruan tinggi utama pada tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan hasil sebaliknya. Bahkan teridentirfikasi bahwa sejak UNCLOS 1982 belum lagi ada keputusan mendasar yang melengkapi bahkan menyempurnakan hasil-hasil yang telah dicapai dalam menata dan mengelola tanah air sesuai dengan harapan dari para pelopor bangsa dalam sumpah pemuda tahun 1928 sebelum proklamasi tersebut.

3. Beberapa kelemahan dalam mewujudkan Arsipelago Indonesia

Dari beberapa pengalaman selama mengikuti perkembangan pengelolaan tanah air ini melalui keikut sertaan dalam seminar, diskusi, beberapa kajian mengenai pengelolaan ruang wilayah perkotaan, pedesaan hingga wilayah pulau-laut Indonesia, tercatat banyak kelemahan yang membuat terwujudnya kejayaan arsipelago Indonesia masih bermasalah dan sebagian kecil dapat disajikan dalam bab ini.

Catatn tersebut terkumpul sejak mengikuti program pasca sarjana Development Planning Unit University Collage London tahun 1978, kesertaan dalam pembentukan Konsorsium Mitra Bahari di 34 provinsi sebagai bagian dari wakil perguruan tinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun 2004 hingga 2015, kesertaan dalam berbagai program profesi Ikatan Arsitek Indonesia maupun Ikatan Ahli Perencanaan, serta keterlibatan dalam berbagai penelitian serta perencanaan di berbagai wilayah di berbagai bahkan perancangan sectoral maupun kewilayahan berbagai provinsi di NKRI, juga keterlibatan dalam pengajaran Pendidikan tinggi maupun program pasca yang diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah selama ini,

Selama ini banyak identifikasi maupun pengerrtian yang disampaikan oleh ilmuwan maupun konsultan ahli dari berbagai negara daratan yang disampaikan melalui produk studi, konsultasi, maupun program pendidikan tinggi ataupun reverensi, yang intinya berbasis visi mereka sebagai warga negara daratan (continental) untuk diterapkan atau ditanam dalam konsep berfikir warga bangs akita yang menggunakan atau belajar di negara mereka. Bahkan dalam keterlibatan mereka sebagai konsultan dalam pembangunan di negeri ini terbaca masuknya kebiasaan atau adanya kepentingan dan kehendak keterlibatan negara mereka terhadap perkembangan pembangunan di negara arsipelago ini.

Mereka banyak menganggap bahwa pembangunan perkotaan dan wilayah negara arsipelago ini seolah berada di daratan luas yang kadang sama sekali tidak berkaitan dengan kepentnigan negara dan warga arsipelago yang hidup di perairan atau kelautan. Bila pemikiran tersebut tertanam di mahasiswa kita, lulusan tersebut pada umumnya bertindak sesuai apa pengetahuan yang diperoleh di negara daratan tersebut, apapun kontinennya. Kenyataan ini wajar terjadi, namun merupakan malapetaka bagi negeri arsipelago ini. Walaupun sejak 1982 eksistensi dan hak mengelola wilayah kelautan kita semakin mantap di dunia ini, selama ini pembangunan di NKRI lebih condong memenuhi terwujudnya kesejahteraan di kawasan daratan dan mengabaikan bahkan cenderung mematikan kepentingan warga perairan dan lautanyang turut menjadi modal lahirnya bangsa Indonesia. Bila hal ini terus berlanjut, berkurang hingga hilangnya cita-cita membentuk negara yang menyejahterakan bagi seluruh penghuni daratan dan kelautan Indonesia akan cepat berakhir, bahkan mungkin menjadi terpecah-

pecah menjadi banyak negara daratan kepulauan seperti negara daratan lainnya, seperti keinginan negara penjajah dahulu yang memutus akses kita ke lautan dan cuma berkepentingan dengan penyedotan kekayaan lingkungan alam kita saja.

Apabila kita sungguh-sungguh beritikad membangun wilayah arsipelago versi tanah air Indonesia, tentu istilah arsipelago dengan pengertian negara kepulauan tidak kita telan begitu saja namun dikoreksi kembali menjadi negara kepulauan dan kelautan. Bahkan kelemahan meningkatkan ilmu kelautan secara utuh dan tidak bertahan secara sectoral (perikanan, lingkungan alam lautan, maritim, pembangunan fasilitas di lautan, dan sebagainya) bahkan menurun selama ini segera dikoreksi dengan berbagai upaya, perbanyak riset, pendalaman ilmu dan teknologi secara lebih menyeluruh bahkan strategis yang membuat negara arsipelago terbesar menjadi terunggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi diantara berbagai negara arsipelago di dunia ini.

Salah satu peluang adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan lagi kementerian yang didominasi oleh ilmu perikanan laut seperti yang mereka ungkapkan selama ini, namun merupakan pusat ilmu kelautan secara utuh (komperhensif, strategis, sesuai kelautan bagi suatu negara arsipelago) yang jauh lebih lengkap. Ilmu kelautan di Indonesia sebagai tempat semua negara arsipelago di dunia ini belajar mengenai kelautan, dari aspek alam hingga teknologi mutahir. Kelautan bukan cuma label lokasi namun justru dasar ilmu yang berkembang sejak awal lahirnya atau bahkan tenggelamnya wadah kehidupan manusia saat permukaan laut secara alami membuat semua daratan berada di bawah permukaannya akibat perubahan lingkungan alam. Manusia Indonesia yang hidup di negara arsipelago terbesar ini harusnya justru tertantang untuk hidup bersama perubahan tersebut.

Sebagai contoh lain, istilah pulau dan kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu kelautan. Pulau bukan suatu daratan yang tetap kering walau air pasang. Kalau melihat perkembangan di negara Jepang, Singapura, Cina bahkan Dubai, pulau bahkan dapat diperluas, dikembangkan bahkan dibuat dari tidak ada. Berawal dari diskusi di seminar internasional, undangan diskusi lanjutan di perguruan tinggi di beberapa kota, mengenai kehidupan di atas perairanh, Cina bahkan berhasil membuat pulau berdasarkan keberadaan struktur laut di bawah permukaan air. Salah satu pulau buatan Cina di dekat Filipina bahkan menjadi salah satu pangkalan militer mereka demi mempertahankan klaim kepemilikan laut Cina Selatan sebagai wilayah laut negara Cina. Pulau adalah puncak dari struktur laut yang muncul ke permukaan perairan, secara alami (a.l. gunung berapi) maupun buatan.

Gagasan lain yang lahir dari perancangan bangunan atau bidang arsitektur, bahkan selain tempat hidup baru berupa pulau bukan hanya dapat dibuat di atas permukaan perairan, bahkan telah berkembang secara terapung, namun juga di dalam atau di bawah permukaan air, beserta ekosistem daratan yang secara alami berada di permukaan tanah, bahkan melalui bioteknologi dapat berkembang di bawah tanah atau perairan. Bersama pengembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju, manusia mampu mewujudkan sesuatu yang baru tanpa mengharapkan perubahan alami yang tidak atau belum terjadi.

Aspek lain terkait dengan UNCLOS 1982 adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Bersamaan dengan keluarnya wilayah laut territorial plus hak pengelolaan laut (ZEEI) pada tingkat global, UNCLOS juga mensyaratkan Indonesia menyediakan tga jalur ALKI di bagian Barat, Tengah maupun Timur wilayah Indonesia bagi lintas laut Utara – Selatan kapal-kapal internasioal. Jalur tersebut membuka hubungan pelayaran dari atau ke negara-negara di bagian Utara dan Selatan Indonesia. Pada masa itu masih terdapat negara jajahan Portugis di pulau

Timor bagian Timur, (sekarang Timor Leste), komunikasi intens antar Inggeris (United Kingdom) dengan negara Australia, serta kepentingan negara-negara ex-penjajah dari Kawasan Eropa dan ex-jajahannya di Kawasan Asia – Pasifik.

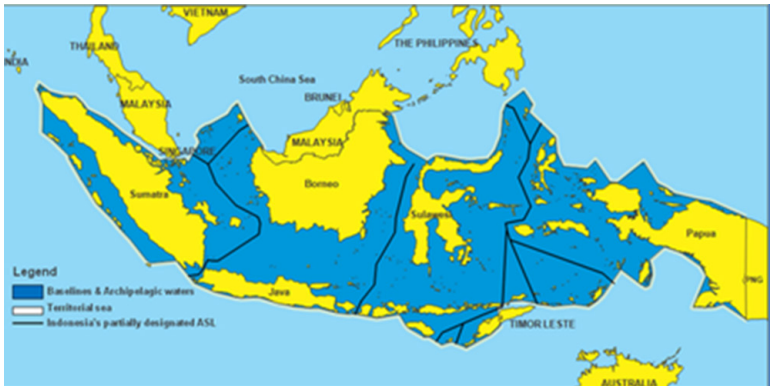

Peta 1 : Peta Indonesia berbasis UNCLOS 1982

Perlu dicatat bahwa dimensi kapal besar terutama dengan aktifitas perdagangan atau ekspor impor masih jauh di bawah ukuran masa kini. Penentuan jalur lintas negara Indonesia juga tidak melalui kajian perubahan lingkungan maupun social ekonomi dunia maupun negara setempat (lebar lautan antar pulau, kedalaman laut, permukiman di laut, dampak terhadap kehidupan serta penghidupan nelayan local, ekosistem lautan yang dilintasi serta perkembangan ilmu dan teknologi perkapalan akibat meningkatnya perdagangan dunia di masa mendatang). Tampak bahwa penentuan lokasi dan jumlah jalur lintasan internasional tersebut lebih mengutamakan kepentingan negara-negara besar yang masih menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara dan Pasifik pada masa itu. Perkembangan dalam lebih dari 40 tahun setelahnya (2025) terlihat bahwa kondisi global pada masa ini sudah sangat berubah, demikian juga status dan kepentingan dari negara-negara yang dilewati jalur internasional tersebut telah sangat berbeda. Oleh karena itu aspek positif dan negative dari adanya jalur ALKI bagi negara arsipelago maupun kegiatan global di Asia – Pasifik setempat pada masa kini maupun diperkirakan akan berkembang pada masa mendatang sangat perlu untuk ditinjau serta disempurnakan kembali.

4. Lingkungan Arsipelago Indonesia di masa mendatang

Selain aspek perubahan lingkungan dan ekosistem serta perkembangan social-ekonomi-politik hingga pertahanan dan keamanan di masa mendatang tidak dapat hanya berupa koreksi dan perbaikan kesalahan perjalanan sejarah pada masa lalu. Setiap masa pemerintahan memiliki visi dan misi masing-masing yang mengacu kepada kekurangan yang dirasakan pada masa sebelumnya ataupun cita-cita baru yang ingin diwujudkan pada masa pemerintahannya. Namun demikian ada pesan awal pembentukan NKRI yang perlu diwujudkan dan ternyata justru setelah sekian banyak tercapai hingga tingkat pengakuan internasional, namun justru isi dan hasil nyata perjuangan setelah kemerdekaan dan perjuangan penyempurnaan hingga tahun 1982 justru seakan diabaikan, terlupakan, bahkan dapat ditinggalkan karena masuiknya kembali pengaruh pemikiran negara daratan yang sejak semula ingin ditinggalkan dan menjadi acuan baru pembangunan kawasan daratan kepulauan maupun Kawasan kelautan saling menunjang tanpa diganggu oleh persitiwa alam termasuk kenaikan muka laut hingga terwujud negara arsipelago Indonesia yang lebih sejahterq.

Perlu disadari bahwa kehidupan dan penghidupan di daratan kepulauan dan di lautan negara arsipelago Indonesia bukan merupakan dua aspek yang sesungguhnya terpisah sehingga penyatuannya tampak seperti suatu impian bahkan khayalan yang sukar diwujudkan. Perlu diterima bahwa selain kehidupan di daratan kepulauan , kehidupan di lautan telah terjadi dan bertahan selama sekian puluh bahkan ratusan tahun di negara lain (kampung laut

komunitas Jawa muslim di lautan Thailand telah bertahan dan sejak lebih 200 tahun yang lalu, sebelum ada NKRI). Kasus di atas merupakan kehidupan alternatif yng ternyata memang telah sekian lama terjadi.

Disisi lain, kehidupan di lautan akan merupakan masa depan bagi Sebagian bangsa kita yang sekarang masih berbasis daratan, karena lokasi kehidupannya berada di Kawasan yang secara bertahap akan menjadi Kawasan lautan, apapun upya untuk memperlambat proses perubahan tersebut. Kenyataan tersebut merupakan konsekuensi dari memilih hidup di negara arsipelago, sebagaimana dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita yang memang sadar akan membangun negara bersama-sama antara yang tinggal di daratan maupun di lautan.

Tanah Air negara Arsipelago Indonesia cukup luas. Bahkan ada ramalan peta daratan yang tersisa saat seluruh es di kutub bumi mencair ternyata bagian dari pulau-pulau besar Indonesia makin bertahan. Hal ini masih dimungkinkan karena keberadaan deretan gunung api maupun pegunungan di pulau-pulau besar gugus pulau Indonesia berada dai hampir semua pulau besar Indonesia. Bila ditambah dengan kemampuan iptek negara ini untuk mempertahankan keberadaan pulau-pulau strategis kita, dengan mempertinggi permukaan atau bahkan membangun di atas struktur laut menjadi pulau buatan baru di sepanjang wilayah perbatasan negara ini maka keutuhan wilayah pulau-laut arsipelago Indonesia akan bertahan lebih lama lagi.

Dalam pemikiran jangka panjang, kemampuan membangun pulau buatan baru serta kemampuan pimpinan daerah wilayah perbatasan untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan warganya untuk maju berkelanjutan, perlu saling dukung sehingga keberadaan garis batas wilayah luar arsipelago Indonesia dapat terjaga dengan baik. Dalam hal ini pendekatan masa lalu yang hanya berbasis kepadatan penduduk sebelumnya perlu diubah menjadi lebih strategis yaitu pembagunan di sepanjang wilayah perbatasan perlu menjadi prioritas. Keunggulan pimpinan daerah dalam melahirkan, memimpin dan mendukung semangat pembangunan di daratan kepulauan serta lautannya perlu menjadi prioritas terpilihnya tokoh pimpinan daerah perbatasan wilayah NKRI. Lokasi perbtasan daratan, pesisir, pulau kecil maupun permukiman terapung di perbatasan perlu menjadi magnet pembangunan serta prioritas pembangunan di masa depan negara kita. Jangan sampai kondisi terdahulu yang menunjukkan bahwa peserta pemilihan umum ternyata lebih banyak di pulau Jawa daripada ulau-pulau lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ternyata pembangunan di pulau Jawa merupakan daya tarik bagi penduduk luar pulau Jawa untuk pindah ke pulau Jawa. Atau ketimpangan prioritas pembangunan antara di lokasi pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya cukup tinggi.

Prioritas dan strategi membangun di wilayah yang lebih banyak penduduknya merupakan pendekatan yang meningkatkan ketidak seimbangan kemajuan wilayah di suatu negara yang cukup luas. Disisi lain kepadatan yang lebih tinggi di kawasan daratan menunjukkan bahwa minimnya program peningkatan ikondis dan fasilitas kehidupan di kawasan kelautan tampak jauh tertinggal atau bahkan tidaik mampu menjadi magnet pembangunan bagi negara kepulauan tertentu (saat ini termasuk Indonesia). Sebagai negar arsipelago terbesar, Indonesia belum berhasil mengubah perhatian warga negara serta pimpinan daerahnya untuk mengutamakan sisi kelautan dalam pembinaan bangsanya. Pandangan penduduk Kepulauan Seribu yang sekitar tiga decade yang lalu banyak yang bengga sebagai orang laut dan tidak menganggap perlu untuk mengenal kehidupan di Jakarta tampaknya tergusur. Generasi beberapa dakede kemudian justru dari kaum muda setempat mulai mennyakan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di kota Jakarta. Hal ini wajar terjadi karena

banyak pimpinan daerah Jakarta yang lebih mementingkan pembangunan di daratan pulau Jawa, bahkan menyisihkan kehidupan mereka yang tinggal di pesisir atau kepulauan yang mencapai lebih dari 100 pulau. Apalagi perhatian utama justru memprioritaskan pembangunan tanggul laut hingga pulau buatan bagi kaum berpunya, walau setelah tidak menarik lagi ditinggalkan terbengkalai. Padahal tanggul laut ataupun hutan Mangrove yang membentengi daratan dari gelombang laut yang menggerus pesisir pantai Cuma bertahan dalam beberapa decade. Apalagi tanggul laut, tidak akan bertahan terlalu lama. Negeri Belandapun mulai beralih ke permukiman terapung dan menerima realita kenaikan muka laut sebagai kehendak sejarah. Keahlian mereka membangun bendungan duma bertahan beberapa ratus tahun dan kini mulai bersiap untuk hidup Bersama kenaikan muka laut. Saran mereka untuk pembangunan permukiman di negara Maladewa justru bagaimana membangun permukiman terapung yang dilindungi oleh pulau-pulau penahan gelombang dari lautan sekitar.

Serupa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gagasan pembangunan di masa mendatang, pelaksanaan program pembangunan di negara lain, serta peluang penerapannya di arsipelago Indonesia, Peta 2 menggambarkan peluang masa depan negara kita terkait dengan keterkaitan antara peluang masa dating dengan arah penataan garis besar kelautan kita yang perlu dipersiapkan sejak kini.



Peta 2 : Peta Prediksi Kepulauan Indonesia ketika Es Kutub mencair semua

Dalam Peta 2 jalur laut ALKI di Indonesia hanya ALKI 2 yang dipertahankan karena terjadi perubahan fungsi kemaritiman di Indonesia. Pelabuhan Balikpapan di Kalimantan Timur bersama Pelabuhan baru di Sulawesi Barat menjadi gerbang keluar masuknya kapal besar internasional yang bertransaksi secara global di Indonesia, dekat Ibu Kota Nusantara dan pusat-pusat kegiatan internasioanl lin di kedua provinsi tersebut. Tiga pelabuhan skala internasional lain adalah di Sumatera Utara hingga Aceh merupakan pusat produksi dan industri Indonesia bagian Barat.

Papua Barat atau Raja Ampat akan merupakan lokasi strategis di bagian Timur Indonesia. Sedqangkan di pulau Lombok adalah lokasi strategis pelabuhan Global dari Indonesia bagian Selatan. Pelabuhan Tanjung Priok tidak berfungsi lagi secara Global karena lautnya lebih dangkal, ALKI 1 tidak dikembangkan ikarena terdapat gunung api dan selatnya terlalu sempit. Sedangkan ALKI 3 tidak difungsikan secara global karena lautan setempat merupakan Kawasan ekosistem laut yang cukup kaya. Terdapat tujuh gunung api di bawah permukan laut yang selain potensial bagi kesuburan ekosistem laut Indonesia Timur juga berpotensi bencan bila sedang aktif. Pelabuhan Global di Indonesia bagian Selatan merupakan juga gerbang industry setempat, juga lokasi-lokasi wisata seni budaya kesenian tradisional daerah sejak lama. Banyaki kota di mantan pulau Jawa bagian Utara yang permukaan tanahnya sudah berada di bawah muka laut. Tidak ada gunanya membuat Tanggul Laut sepanjang bagian Utara pulau Jawa karena pantai pulau lain di Indonesia cukup banyak yang

mengalami kondisi serupa. Justri kota-kota dan bangunan di pulau besar yang permukaan tanahnya tenggelam akan menjadi Kawasan kajian ilmiah maupun lokasi uji percobaan rancangan baru bangunan yang berada di peralihan antara daratan dan lautan di negara ini.

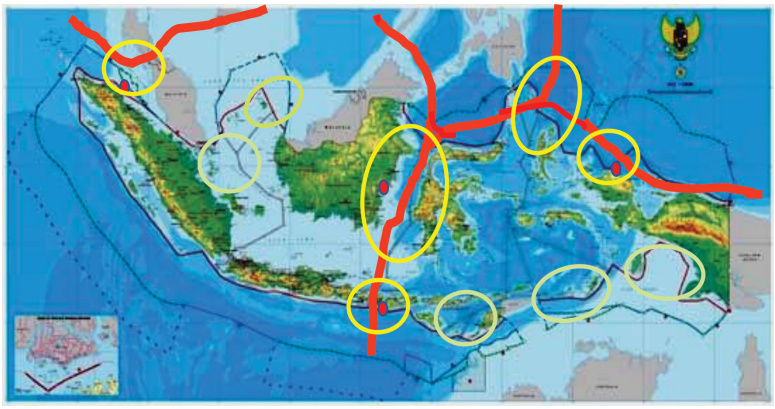

Peta 3 : Peta Usulan Peubahan Jalur ALKI Indonesia sesuai kondisi masa datang

Bila Peta 2 adalah gambaran masa dating bagi Arsipelago Indonesia, maka Peta 3 adalah ilustrasi kawasan mana saja yang gugusan kepulauan dan kelautannya perlu dikembangkan sehingga tercapai kondisi dalam Peta 2 tersebut. Dalam Peta 3 juga ditunjukkan kakas an lokasi potensial untuk menjadi gugusan pulau – laut yang perlu dikembangkan sebagai gerbang utama ke pusat-pusat olahan hasil tambang, industry barang dan jasa serta obyek wisata seni budaya Indonesia. Sedangkan lokasi lain adalah perlunya dikembangkan pulau-pulau dan lautan atau gugus kepulauan baru mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan daerah perbatasan laut yang saat ini cukup terbuka bagi masuknya kekuatan-kekuatan laut yang tidak selalu kita harapkan.

Sebagai negara arsipelago terbesar sudah tentu pusat-pusat Pendidikan, kajian dan pelatihan bidang kelautan serta industry perkapalan, peralatan serta kelengkapan lain untuk kehidupan dan penghidupan di lautan perlu menjadi primadona produksi kita. Bahkan seperti negara Maladewa, tidak semua pendaratan atau airport di kepulauan kecil Indonesia perlu berlokasi di daratan. Lautanpun cukup luas untuk menjadi airport pesawat kecil antar pulau maupun antar wilayah di lautan. Permukiman bahkan perkotaan serta fasilitas kerja baik yang bersifat menetap maupun berpindah di atas laut juga dapat dikembangkan. Bahkan pusat Pendidikan dan laboratorium di permukaan hingga di dalam laut dapat dikembangkan. Bila negeri daratan berusaha mengungsi dari serbuan banjir rob dan kenaikan muka laut, negara arsipelago justru seharusnya menganggap hidup bersama lautan merupakan tantangan atau bahkan kewajaran sehingga selain produksi kapal kecil hingga kapal induk dan kapal selam perlu menjadi program selanjutnya selain program pembangunan permukiman, perkotaan, Pendidikan dan Latihan, hingga industry bersih di Kawasan lautan. Bila itu semua bukan lagi mimpi maka masa depan negara arsipelago Indonesia telah menjadi kenyataan.

Depok, 25 Maret 2025

Abimanyu Takdir Alamsyah